



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
UNIT KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIDHA ANSARI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN TAHANAN, KESEHATAN, REHABILITASI,
PENGELOLAAN BENDA SITAAN, BARANG RAMPASAN NEGARA, KEAMANAN
3. NHK : 135226

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 899.300.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 133 m²/91 m² di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 1331 m² di KAB / KOTA LANGKAT, WARISAN Rp. 399.300.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 227.000.000

1. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOTOR, HONDA BEND Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 107.250.000**D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 525.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 1.758.550.000**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.758.550.000**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.